

**PONO
ROGO
HEBAT**

RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN PONOROGO**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan taufik-Nya sehingga kita dapat menyusun RENJA (Rencana Kerja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai pedoman serta arah sesuai keadaan lapangan dengan harapan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya dan masyarakat Ponorogo pada umumnya.

Adapun Rencana kerja (RENJA) ini meliputi sistem koordinasi, manajemen dan aspek potensi serta tingkat partisipatif yang ada dalam Perangkat Daerah dimana didalamnya terdapat unsur pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, merupakan hasil analisa yang didasarkan pada kebutuhan serta kecenderungan yang berlaku pada masyarakat dan pemerintah desa. Dari hasil analisa tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo dapat mengidentifikasi serta menentukan sasaran strategis yang selanjutnya dipergunakan sebagai penentu langkah guna mendorong serta menumbuhkembangkan keberdayaan masyarakat desa dan keberdayaan Pemerintahan Desa dalam rangka ikut serta berperan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun kedepan di Kabupaten Ponorogo.

Dengan memohon petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengabdian dengan sebaik - baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Pelayanan Publik, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Ponorogo



Tony Sumarsono, S.Sos., M.Si.
Rebidan Utama Muda
NIP. 19710117 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	34
3.4 Penetapan Isu-isu Strategis	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana diamanatkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bertanggungjawab kepada Bupati Ponorogo membuat Rencana kerja tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan misi yang di ampu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2021 – 2025 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo serta dokumen – dokumen lain secara sinergi. Selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Efektifitas pelaksanaan Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo tahun 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didukung dengan kemampuan pemangku kepentingan (stakeholder) mengimplementasikan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Diusungnya Rencana Kerja ini secara simultan akan diselaraskan dengan perubahan paradigma dan nilai yang selalu berkembang dalam organisasi dan masyarakat dengan tetap mengacu pada skala prioritas pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4), yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 155 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.
23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 418 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Bupati Nomor _____ tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga dapat dipergunakan untuk:

1. Sebagai sarana koordinasi untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan tahunan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo dalam

rangka mewujudkan konsistensi, keterpaduan dan kesinergian program – program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan Pemerintahan Desa.

3. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas partisipatif diterapkan dalam pelaksanaan setiap program yang dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mewujudkan *good governance* dan *good corporate government*. Selain itu dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap program yang dilaksanakan akan dapat diketahui kekurangannya sehingga ada perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

1.3.2 Tujuan

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo 2025 ini bertujuan untuk merumuskan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU (TAHUN 2024)

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD.

2.5. Peneilaian usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
TAHUN 2025**

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

3.4. Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) suatu Perangkat Daerah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Perangkat Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran / hasil dari sub kegiatan/ kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan seperti yang telah diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah secara umum dapat dilihat dari **Format A** (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024) dapat dijabarkan sebagaimana terlampir.

Format A

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian
Renstra Perangkat Daerah

1	2	3	4	5	6			7	8	9	
					10	11	12			13	14
	Uraian/Isi/Bagian Uraian Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)/ Kegiatan (Output)	TARGET Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2025	Realisasi Tingkat Kinerja Hasil Program dan Kebijakan Kegiatan 1/3 Tahun 2021	TARGET dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	TARGET Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah 1/3 Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 1/3 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
							8=(7/6)			10=(9+7/6)	11=(10/8)
	Uraian Waktu Bekerja Pelayanan Desa										
2.13 01	Program Kewirausahaan Desa	Persentase perusahaan desa yang dikembangkan	90%	100%	100%	20%	0	0	0		
2.13 02	Pembangunan Perumahan Desa	Persentase desa baru (satu) Fasilitas Desa	90%	100%	100%	20%	0	0	0		
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah desa baru hasil Fasilitas Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	0	0	0		
2.13 03	Fasilitas Pelayanan dan Kode Desa	Jumlah Desa Baru yang mendapatkan Kode Registrasi Desa dan Gubernur	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	0	0	0		
2.13 04	PROGRAM PENGINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama desa yang dikembangkan	100%	90%	90%	50%	0	0	0		
2.13 05	Fasilitas Kerja sila antar Desa	Jumlah kawasan perbatasan yang di fasilitasi pembangunan ekonomi, sosial dan pelayanan kawasan perbatasan	100%	90%	90%	2 Kawasan	0	2 Kawasan	0		
2.13 06	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa/daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (TKP/P Kawasat) yang mendapatkan pembinaan manajemen pembangunan kawasan perbatasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Tim	100	2 Tim	0		0%
2.13 07	Fasilitas Peningkatan Kawasan Perbatasan	Jumlah kawasan perbatasan yang di fasilitasi pembangunan sosial dan pelayanan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	100	2 Kawasan	0		0%
2.13 08	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang berjalan baik	90%	70%	90%	0	0%	90%			

2.12 04 2.01	Pembinaan dan Penguasaan Perencanaan a. Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase kepatuhan desa terhadap peraturan/kebijakan administrasi.	87%		90%	100%	111%	90%		
		Presentase kepatuhan pemerintahan desa yang tidak menangkur hukum.	80%	-	85%	100%	117%	82%		
		Presentase penyusunan produk hukum mengenal desa yang tertinggal.	80%		80%	100%	117%	80%		
2.13 08 2.05 02	Facilitas Penyusunan Produk Hukum Desa.	Jumlah Produk Hukum mengenai desa yang terbentuk.	281 Desa	8 Produk Hukum	10 Perbul	8 Perbul	80%	10 Perbul	20 Perbul	
2.13 08 2.05 04	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa.	Jumlah desa yang efektifitas dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) nya.	281 Desa	281 Desa	281 Desa	281 Desa	100%	281 Desa	281 Desa	
		Jumlah desa yang efektifitas dalam penyaluran Dana Desa (DD) nya.			281 Desa	281 Desa	100%			
		Jumlah desa yang efektifitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa	281 Desa	281 Desa	281 Desa	281 Desa	100%	281 Desa	281 Desa	
2.13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kap asitas Aparatur Pemerintahan Desa.	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintahan Desa.	281 Desa	281 Desa	301 orang	301 orang	100%	562 Orang	562 Orang	
		Jumlah peserta pembinaan Hukum bagi Aparatur Pemerintahan Desa.	281 Desa	281 Desa	305 orang	301 orang	100%	281 Orang	281 Orang	
2.13 08 2.01 07	Evaluasi dan Penguasaan Peraturan Desa	Jumlah produk hukum Desa yang divalidasi dan diakreditasi.	281 Desa	126 Produk	115 Produk	130 Produk	112%	123 Produk Hukum	0 Produk	
2.13 04 2.01 06	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sami antar Desa.	Jumlah BUMDesa yang mengikuti pembinaan di tingkat Kabupaten.	281 BUMDesa	20 BUMDesa	281 BUMDesa	281 BUMDesa	100%	20 BUMDesa	20 BUMDesa	
		Jumlah BUMDesa yang aktif.			-	-	-	281 BUMDesa	281 BUMDesa	
		Jumlah jumlah BUMDesa tingkat Provinsi.			1 BUMDesa	1 BUMDesa	100%	1 BUMDesa	0	
2.13 04 2.01 08	Peningkatan a. Pembinaan, Pengangkutan dan Pembekalan Kepala Desa.	Jumlah desa yang diakreditasi Pembinaan KDAW.	281 Desa	0	3 Desa	3 Desa	100%	3 Desa	0	
		Jumlah Kepala Desa Terpih melalui proses Pilkades otonom	281 Desa	106 Kades	23 Desa	23 Desa	100%	23 Desa	0%	

2.13 04 2.01 10	Fasilitas Penganggaran dan Pemberian Perangai Desa.	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengisian anggaran kewangan Perangai Desa	281 Desa	100 Desa	91 Desa	10 Desa	40%	30 Desa	110 Desa	
		Jumlah desa yang difasilitasi jaminan kesehatan.	281 Desa	281 Desa	281 Desa	281 Desa	100%	281 Desa	281 Desa	
		Jumlah desa yang difasilitasi pengisian anggaran SPD antar waktu.	281 Desa	281 Desa	33 Desa			281 Desa	0	
2.13 04 2.02 11	Fasilitas Penyusunan Profil Desa.	Jumlah desa yang menerapkan Aplikasi SD/Sistem Informasi Desa ONLINE.	281 Desa / 26 Kelurahan	281 Desa				281 Desa	201 Desa	
		Jumlah Dokumen Profil Desa dan Kelurahan yang diupload.	281 Desa / 26 Kelurahan	281 Desa				307 Desa/Kel	307 Desa/Kel	
2.13 04 2.01 12	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa.	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan aset desa.	281 Desa	281 Desa	281 Desa	281 Desa	100%	281 Desa	281 Desa	
2.13 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kualitas Anggota BPO.	Jumlah pembinaan untuk meningkatkan kapasitas Perangai Desa, SPG, Kelembagaan Desa.	281 Desa		281 Orang	211 Orang	110%	0	0	
2.13 04 2.02 18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.	Jumlah desa yang difasilitasi untuk mengikuti evaluasi perkembangan Desa.	281 Desa / 26 Kelurahan	281 Desa				20 Desa	20 Desa	
		Jumlah keberhasilan Lomba Desa tingkat Provinsi	1 Desa	-				1 Desa	1 Desa	
2.13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif						80%		
2.13 05 2.01	Pembentayan Lembaga Kemasyarakatan yang terintegrasi di Bidang Pembentayan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pembentayan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Kecamatan Hukum Adat yang Sementara Daerah	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	-					80%		
		Persentase desa dengan sadar POK-ahli						100%		
		Persentase desa yang mengikuti BSSDM	1	1					7%	
		Persentase pasar desa yang sehat.	1	1					30%	
		Persentase Pembinaan Kapasitas Masyarakat kurang mampu	1	1					90%	

	Kebudayaan, Nilai &	Promosi jombangan, pelaksanaan & pengelolan Sumber Daya Alam dan Keberdayaan Masyarakat Desa	-					25%		
		Promosi jombangan pelaksanaan, pengembangan Teknologi Tepat Suka (TTS) dan Pemanfaatan TTS	-					25%		
		Promosi pengabdian Dharma Wanita aktif	-					5%		
		Promosi TSW Pasang Promosi aktif	-					5%		
2.13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah pengurus & anggota Dharma Wanita yang aktif	600 Orang	-				240 Orang	200 Orang	
		Jumlah Tim Pelajar yang aktif mengikuti lomba	200 desa	150 desa				100 Orang	100 Orang	
		Jumlah Peribub yang mendukung pelaksanaan pemurnihan starting	8 peribub	8 peribub				1 Peribub	0	
		Jumlah Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang standing	0	100 orang				21 KPM (new and 21 Kac)	0	
		Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki perwakilan kelembagaan Desa dan Kelurahan	-	-				200 Desa/00 Kel	0	
		Jumlah Desa yang mempunyai Lembaga Adat Desa	0	200 desa				1 Desa	0	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	0	200 orang				20 Desa	0	
2.17 05 2.01 04	Fasilitas Penelitian Sains dan Presarwa Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah laboratorium Sains dan Presarwa	201 Desa/00 Kelurahan	40 Rakan				100 Fasilitas	100 Lembaga	

	Hukum Adat									
2.13 05 2.01 05	Fasilitas Pengembangan Usaha (Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pasar Desa yang mengikuti Pembinaan	40 Pasar Desa	40 Pasar Desa	40 Pasar Desa	40 Pasar Desa	100%	40 Pasar Desa	40 Pasar Desa	
		Jumlah pasar desa yang diujikan untuk Tingkat Provinsi		1 Pasar Desa	-	-	-	1 Pasar Desa	1 Pasar Desa	
		Jumlah hasil pembinaan Pelatihan TTS	250 Orang	50 Orang				20 Orang	20 Orang	
		Jumlah hasil pembinaan peserta pelatihan DSA	150 Orang	30 Orang				20 Orang	30 Orang	
		Jumlah hasil pembinaan Pengolahan Sumber Mata Air	250 Orang	0				30 Orang	35 Orang	
		Jumlah hasil pembinaan penerima bantuan Jaminan PUSA	835 Orang	0				67 Orang	67 Orang	
		Jumlah BUMDesMa yang di Manas	201 BUMDesMa					0	0	
2.13 15 2.01 06	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah hasil pembinaan Lomba Inofek	60 Inovator TTS	50 Inovator TTS				0		
2.13 05 2.03 07	Fasilitas Bulan Bakti Karang Royong Masyarakat	Jumlah ketubuhan BBGM tingkat Propinsi	1 Desa	1 Desa				1 Desa	1 Desa	
		Jumlah peserta BBGM TK Kabupaten	200 Desa	200 Desa				20 Desa	20 Desa	
2.13 05 2.01 09	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Keluarga	Jumlah desa yang aktif dalam pelaksanaan gerakan PKK	281 Desa / 26 Kelurahan	281 Desa / 26 Kelurahan	307 Desa/Kel	307 Desa/Kel	100%	281 Desa / 26 Kelurahan	281 Desa / 26 Kelurahan	
		Jumlah desa yang aktif Tim Penggerak PKK Kabupaten	281 Desa / 26 Kelurahan	281 Desa / 26 Kelurahan	307 Desa/Kel	307 Desa/Kel	100%	281 Desa / 26 Kelurahan	281 Desa / 26 Kelurahan	
		Jumlah desa/kel yang membentuk Keluarga Sadar	281 Desa / 26 Kelurahan					281 Desa / 26 Kelurahan	0	
		Jumlah desa/kel yang mengikuti kegiatan pasar tempat	281 Desa / 26 Kelurahan			307 Desa/Kel	307 Desa/Kel	100%	281 Desa / 26 Kelurahan	281 Desa / 26 Kelurahan

	Jumlah desa/kel yang mengikuti Lomba pasar - Basmadhu Tingkat Kab	201 Desa / 20 Kelurahan		207 Desa/Kel	207 Desa/Kel	100%	201 Desa / 20 Kelurahan	201 Desa / 20 Kelurahan	
	Jumlah peserta Lomba Desa Baik Tingkat SLTA	20 SLTA					20 SLTA	20 SLTA	
	Jumlah peserta pameran - Anggata (Tire building)	40 Orang					40 Orang	40 Orang	
	Jumlah Perbut yang mengantar BKNC	3 Perbut					3 Perbut	0	

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, dalam proses pengukuran kinerja yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

Berdasarkan data realisasi Target Kinerja program dan kegiatan sampai dengan Tahun Anggaran 2025 di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan awal Bulan Juni 2025 (Tri Bulan II) secara keseluruhan terlaksana dengan baik, sesuai dengan pentahapan dan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang telah disusun. Hal ini merupakan upaya menyelesaikan target kinerja sesuai rencana dalam Perjanjian Kinerja. Keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh adanya koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah, tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat serta adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo.

Tingkat capaian kinerja Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo pada Tri Bulan kedua tahun 2024 dapat dilustrasikan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 2.249.800,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pagu sebesar Rp. 3.076.612.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.885.404.836,- atau 61,28%
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah pagu Sebesar Rp. 92.783.950,- yang terealisasi sebesar Rp. 18.504.000,- atau 19,94%
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pagu sebesar Rp. 1.411.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu sebesar Rp. 227.845.850,- terealisasi sebesar Rp. 94.199.665,- atau 41,34%
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu sebesar Rp. 149.512.800,- terealisasi sebesar Rp. 48.146.008,- atau 9,02%
- g. Penyelenggaraan Penataan Desa pagu sebesar Rp. 143.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.568.789,- atau 17,88%
- h. Fasilitas Kerja sama antar Desa pagu sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.- atau 0%
- i. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pagu sebesar Rp. 4.822.597.200,- terealisasi Rp. 1.893.537.476,- atau 39,26%
- j. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota pagu sebesar Rp. 4.080.214.400,- terealisasi Rp. 1.494.219.560,- atau 36,62%

Berdasarkan data capaian indikator kinerja anggaran Tahun 2024 di atas, maka tingkat capaian kinerja anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo menunjukkan hasil dengan tren yang baik, yaitu 43,30%. Proses pencairan anggaran masih terus berproses karena pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih berjalan. Disamping itu saat ini masih berada di Tribulan Kedua sehingga sebagian besar realisasi anggaran sesuai anggaran kas masih anggran yang bersifat rutin. Hal ini mengindikasikan bahwa program/kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berjalan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator - indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan

penetapan besaran indikator kinerja untuk masing - masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja dari sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan atas sasaran tersebut.

Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohorogo dapat dilihat dari Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah seperti disajikan dalam format **Format B** (sebagaimana format terlampir).

Format B
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SPM/Dimensi Nasional	JKK	Target Rencana Perangkat Daerah							Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisa
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	PROSENTASE DESA MANDIRI	-	-	1,8	5,3	8,9	12,5	16	19,6	24,91	4,98	21,35	-	-	12,5		
2	PROSENTASE DESA MAJU	-	-	17,1	21	24,5	28,1	31,7	35,2	49,82	55,87	-	-	28,1			
3	PROSENTASE DESA BERKEMBANG	-	-	81,1	73,7	66,6	59,4	45,2	45,2	73,67	45,20	22,78	-	-	59,4		
4	INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)	-	-	0,6688	0,6738	0,6785	0,6838	0,6888	0,6938	0,6879	0,7238	0,7559	-	-	0,6838		
5	PROSENTASE ALOKASI DANA DESA (ADD)	-	-	12,02	15,305	18,59	21,67	24,72	27	13,52	16,03	21,29	-	-	21,67		

Catatan : : Untuk realisasi dari Indikator Prosentase Desa Berkembang lebih rendah dari Target Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : sebagian dan desa berkembang naik ke Status Desa di atasnya, sehingga prosentase akan menjadi rendah. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kebijakan - kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan tidak dapat diimplementasikan dengan baik jika Pemerintah Daerah tidak tanggap terhadap kondisi yang berkembang dimasyarakat maupun kondisi yang ada di pemerintahan. Oleh sebab itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pembantu bupati dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa harus peka terhadap isu - isu strategis yang sedang berkembang dan segera mengambil langkah - langkah strategis guna mengatasi permasalahan - permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat berkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo.

Beberapa isu strategis penting yang perlu untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pemerintahan Desa (Pemdes);
2. Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan Desa (SDM);
3. Kapasitas Kelembagaan Desa (Kelembagaan);
4. Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
5. Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat perdesaan;
6. Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna;
7. Pembangunan kawasan perdesaan.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2024 maka permasalahan - permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM seiring upaya mewujudkan good governance.
2. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Sebagai instansi yang bertugas memberdayakan masyarakat dan membina Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Ponorogo, maka dukungan sarana prasarana dan anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan ke setiap desa agar tercipta pemberdayaan masyarakat yang baik dan terbinanya Pemerintahan Desa yang tertib, lancar dan aman.

4. Untuk menjalankan amanat UU Desa, diperlukan adanya peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan dalam hal pengelolaan desa.
5. Masih lemahnya penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam masyarakat untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada disekitar sehingga diperlukan pemberdayaan agar dapat menghasilkan kegiatan ekonomi yang kreatif dan inovatif.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi sumberdaya Aparatur.
2. Peningkatan kinerja karyawan dan koordinasi antar bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Diadakan sosialisasi dan pembinaan untuk menggerakkan kemauan dan menumbuhkan kesadaran/partisipasi masyarakat dalam pengembangan diri sehingga dapat berperan aktif dalam pemberdayaan.
4. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan dalam hal pengelolaan keuangan desa.
5. Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui pelatihan atau pendampingan.
6. Pengembangan potensi ekonomi lokal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan Musrenbang Tingkat Duku, tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten (Forum Rapat Perangkat Daerah) sehingga secara substansi materi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD sudah ada keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo dalam menyusun Rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam proses penyusunan awal RKPD, hasil identifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang selanjutnya dianalisa sesuai kebutuhan Organisasi

Perangkat Daerah, kemudian dipilah antara program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat wajib, prioritas atau rutin.

Untuk mengetahui proses yang dilakukan, mengapa proses tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal dapat dilihat dari *Format C* sebagaimana terlampir.

Format C
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				catatan penting	
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Desa (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				11.373.584.358	URUBAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				14.579.473.650
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg didukung	90%	4.123.474.488	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Desa PMD	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg didukung	90%	4.316.473.650
Program Penataan Desa		Prosentase desa baru hasil Pemekaran Desa	100%	142.000.000	Program Penataan Desa		Prosentase desa baru hasil Pemekaran Desa	100%	142.000.000
Penyediaan/Perawatan Penataan Desa		Prosentase desa baru hasil Pemekaran Desa	100%	142.000.000	Penyediaan/Perawatan Penataan Desa		Prosentase desa baru hasil Pemekaran Desa	100%	142.000.000
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Dinas PMD	Jumlah desa baru hasil Pemekaran Desa	5 Desa	140.000.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Dinas PMD	Jumlah desa baru hasil Pemekaran Desa	5 Desa	140.000.000
Facilitasi Pemisahan dan Kode Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa Baru yang mendapatkan Kode Registrasi Desa dan Gubernur	5 Desa	2.000.000	Facilitasi Pemisahan dan Kode Desa	Unitas PMD	Jumlah Desa Baru yang mendapatkan Kode Registrasi Desa dari Gubernur	5 Desa	2.000.000
PROGRAM PENGUKUTAN KERJASAMA DESA		Prosentase Kerjasama Desa yang dilaksanakan	100%	10.000.000	PROGRAM PENGUKUTAN KERJASAMA DESA		Prosentase Kerjasama Desa yang dilaksanakan	100%	15.000.000

Facilitasi Kerja sama antar Desa	Dinas PMD	Prosentase Kerjasama Desa yang dilaksanakan	100%	10.000.000	Facilitasi Kerja sama antar Desa	Dinas PMD	Prosentase Kerjasama Desa yang dilaksanakan	100%	15.000.000
Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	8.000.000	Facilitasi Kerja sama antar Desa	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	8.000.000
Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	15 Dokumen	5.000.000	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Lembaga	10.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Prosentase Administrasi Pemerintahan Desa yang berjalan baik		10.833.225.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Prosentase Administrasi Pemerintahan Desa yang berjalan baik		6.448.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	Prosentase kepatuhan desa terhadap pelaksanaan/kelempakan administrasi.	95%	10.833.225.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	Prosentase kepatuhan desa terhadap pelaksanaan/kelempakan administrasi.	90%	6.448.000.000
		Prosentase aparat pemerintah desa yang tidak tersangkut hukum.	85%				Prosentase aparat pemerintah desa yang tidak tersangkut hukum.	85%	
		Prosentase penyusunan produk hukum mengenai desa yang tercapai.	85%				Prosentase penyusunan produk hukum mengenai desa yang tercapai.	85%	
		Prosentase BUMDesa dalam kondisi sehat.	60%				Prosentase BUMDesa dalam kondisi sehat.	60%	

		Prosentase informasi data desa yang akurat.	100%				Prosentase informasi data desa yang akurat.	100%	
		Prosentase desa yang mengikuti perubahan desa.	95%				Prosentase desa yang mengikuti perubahan desa.	95%	
Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa.	Dinas PMD	Jumlah Produk Hukum Mengenal Desa yang terbentuk.	10 Perubah	50.000.000	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa.	Dinas PMD	Jumlah Produk Hukum Mengenal Desa yang terbentuk.	10 Perubah	50.000.000
Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Dinas PMD	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) nya.	281 desa	50.000.000	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Dinas PMD	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) nya.	281 desa	50.000.000
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.	281 desa					Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.	281 desa
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.	Dinas PMD	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.	562 orang	100.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.	Dinas PMD	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.	562 orang	100.000.000
	Dinas PMD	jumlah peserta pembinaan hukum bagi Aparatur Pemerintahan Desa.	261 orang			Dinas PMD	jumlah peserta pembinaan hukum bagi Aparatur Pemerintahan Desa.	261 orang	

Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa.	Dinas PMD	Jumlah produk Hukum Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi.	115 Produk Hukum	3.000.000.	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa.	Dinas PMD	Jumlah produk Hukum Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi.	115 Produk Hukum	3.000.000
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.	Dinas PMD	Jumlah Bumdesa yang mengikuti pembinaan tingkat Kabupaten	20 Bumdesa	120.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.	Dinas PMD	Jumlah Bumdesa yang mengikuti pembinaan tingkat Kabupaten	20 Bumdesa	320.000.000
		Jumlah BUMDesa yang dibina.	281 Bumdesa				Jumlah BUMDesa yang dibina.	281 Bumdesa	
		Jumlah lomba Bumdes tingkat Propinsi.	1 Bumdesa				Jumlah lomba Bumdes tingkat Propinsi.	1 Bumdesa	
		Jumlah peserta entry CDC	281 Desa				Jumlah peserta entry CDC	281 Desa	
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 dokumen				Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 dokumen	
Penyenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.	Dinas PMD	Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa KDAW	5 Desa	6.375.000.000	Penyenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.	Dinas PMD	Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa KDAW	5 Desa	375.000.000

<p>Facilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</p>	<p>Dinas PMD</p>	<p>Jumlah desa yang difasilitasi dalam Peningkatan Perangkat Desa</p>	<p>30 desa</p>	<p>3.795.225.000</p>	<p>Facilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</p>	<p>Dinas & PMD</p>	<p>jumlah desa yang difasilitasi dalam Peningkatan Perangkat Desa</p>	<p>218 desa</p>	<p>4.000.000.000</p>
<p>Facilitasi Penyusunan Profil Desa.</p>	<p>Dinas PMD</p>	<p>Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pemeliharaan Kesehatan</p>	<p>281 Desa</p>	<p>10.000.000</p>	<p>Facilitasi Penyusunan Profil Desa.</p>	<p>Dinas & PMD</p>	<p>Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pemeliharaan Kesehatan</p>	<p>281 Desa</p>	<p>200.000.000</p>
		<p>Jumlah desa yang menerapkan Aplikasi SID/Sistem Informasi Desa ONLINE.</p>	<p>281 Desa</p>				<p>Jumlah desa yang menerapkan Aplikasi SID/Sistem Informasi Desa ONLINE.</p>	<p>281 Desa</p>	
		<p>Jumlah Dokumen Profil Desa dan Kelurahan yang difasilitasi.</p>	<p>307 Dokumen</p>				<p>Jumlah Dokumen Profil Desa dan Kelurahan yang difasilitasi.</p>	<p>307 Dokumen</p>	
<p>Facilitasi Penetapan dan Peningkatan Batas Desa</p>		<p>Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan peningkatan Batas Desa</p>	<p>281 Desa</p>		<p>Facilitasi Penetapan dan Peningkatan Batas Desa</p>	<p>Dinas & PMD</p>	<p>Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan peningkatan Batas Desa</p>	<p>281 Desa</p>	<p>300.000.000</p>
<p>Facilitasi Pengelolaan Ases Desa.</p>	<p>Dinas PMD</p>	<p>Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan aset desa.</p>	<p>281 desa</p>	<p>50.000.000</p>	<p>Facilitasi Pengelolaan Ases Desa</p>	<p>Dinas PMD</p>	<p>Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan aset desa.</p>	<p>281 desa</p>	<p>70.000.000</p>
<p>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.</p>	<p>Dinas PMD</p>	<p>Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pelatihan</p>	<p>281 desa</p>	<p>50.000.000</p>	<p>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.</p>	<p>Dinas & PMD</p>	<p>Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pelatihan</p>	<p>281 desa</p>	<p>100.000.000</p>

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.	Dinas PMD	Jumlah desa yang difaasilitasi untuk mengikuti evaluasi perkembangan desa.	20 desa	30.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.	Dinas PMD	Jumlah desa yang difaasilitasi untuk mengikuti evaluasi perkembangan desa.	20 desa	80.000.000
		Jumlah keluiteraan Lomba desa tingkat Propinsi	1 Desa				Jumlah keluiteraan Lomba desa tingkat Propinsi	1 Desa	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Jumlah Desa yang mengikuti di EDESKAJ.	281 Desa				Jumlah Desa yang mengikuti di EDESKAJ.	281 Desa	
		Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	80%	2.264.984.900	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	80%	4.460.000.000
Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di tingkat Pembudayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pembudayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakinya	Dinas PMD	Presentase saalisasi Kegiatan yang dilemparkan	50%		Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Tingkat Pembudayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pembudayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakinya	Dinas PMD	Presentase saalisasi Kegiatan yang dilemparkan	50%	
		Presentase terbentuknya Forum BUMDesa Kecamatan	90%	2.264.984.900				Presentase terbentuknya Forum BUMDesa Kecamatan	90%
		Presentase terfentuknya Forum BUMDesa Kabupaten	90%				Presentase terfentuknya Forum BUMDesa Kabupaten	90%	
		Presentase BUMDesa terdaftar di E-Katalog Lokal LPSE	28%				Presentase BUMDesa terdaftar di E-Katalog Lokal LPSE	28%	

	Prosentase desa dengan kader PKK aktif	100%			Prosentase desa dengan kader PKK aktif	100%	
	Prosentase keikutsertaan puncak perayaan BERSHUMIK Prodesa	100%			Prosentase keikutsertaan puncak perayaan BERSHUMIK Prodesa	100%	
	Prosentase pasar desa yang terlib administratif	90%			Prosentase pasar desa yang terlib administratif	90%	
	Prosentase Pembinaan kepada masyarakat kurang mampu	95%			Prosentase Pembinaan kepada masyarakat kurang mampu	95%	
	Prosentase pengurus Dharma Wanita aktif	95%			Prosentase pengurus Dharma Wanita aktif	95%	
	Prosentase Tim Pujawali Pasyanda (KPM) aktif	90%			Prosentase Tim Pujawali Pasyanda (KPM) aktif	90%	
	Prosentase pembinaan pelaksanaan & pengelolan sumber Daya Alam dan Keberdayaan Masyarakat Desa	75%			Prosentase pembinaan pelaksanaan & pengelolan sumber Daya Alam dan Keberdayaan Masyarakat Desa	75%	
	Prosentase pembinaan pelaksanaan, pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan TTG	75%			Prosentase pembinaan pelaksanaan, pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan TTG	75%	

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Dinas PMD	Jumlah pengurus & anggota Dharma Wanita yang aktif.	200 orang	40.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Dinas PMD	Jumlah pengurus & anggota Dharma Wanita yang aktif.	200 orang	80.000.000
		Jumlah Tim Pokjerta! Posyandu (KPM) aktif	281 desa				Jumlah Tim Pokjerta! Posyandu (KPM) aktif	281 desa	
		Jumlah Sosialisasi Peningkatan Kelembagaan yang dilaksanakan	40 titik				Jumlah Sosialisasi Peningkatan Kelembagaan yang dilaksanakan	40 titik	
		Jumlah Dokumen persiapan kegiatan	40 Dokumen				Jumlah Dokumen persiapan kegiatan	40 Dokumen	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 dokumen				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 dokumen	

<p>Facilities Penyediaan Sarana dan Peralatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.</p>	<p>Dinas PMD</p>	<p>Jumlah Kelompok Masyarakat (Pokmas) penerima bantuan hibah.</p>	<p>206 rumah.</p>	<p>113.000.000</p>	<p>Facilities Penyediaan Sarana dan Peralatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.</p>	<p>Dinas PMD</p>	<p>Jumlah Kelompok Masyarakat (Pokmas) penerima bantuan hibah.</p>	<p>2.200.000.000</p>
<p>Facilities Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.</p>	<p>Dinas PMD</p>	<p>Jumlah Pasar Desa yang mengikuti Pembinaan.</p>	<p>40 Pasar Desa</p>	<p>40.000.000</p>	<p>Facilities Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.</p>	<p>Dinas PMD</p>	<p>Jumlah Pasar Desa yang mengikuti Pembinaan.</p>	<p>70.000.000</p>
<p>Jumlah peserta Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)</p>	<p>30 orang</p>	<p>Jumlah peserta Pembinaan peserta Pelatihan BDA.</p>	<p>20 orang</p>				<p>Jumlah peserta Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)</p>	<p>30 orang</p>
<p>Jumlah hasil pembinaan Pengelolaan Sumber Mata Air.</p>	<p>8 kelompok</p>	<p>Jumlah hasil pembinaan peserta pelatihan BDA.</p>	<p>20 orang</p>				<p>Jumlah hasil pembinaan peserta pelatihan BDA.</p>	<p>20 orang</p>
<p>Jumlah hasil pembinaan Pengelolaan Sumber Mata Air.</p>	<p>8 kelompok</p>	<p>Jumlah hasil pembinaan Pengelolaan Sumber Mata Air.</p>	<p>8 kelompok</p>				<p>Jumlah hasil pembinaan Pengelolaan Sumber Mata Air.</p>	<p>8 kelompok</p>

		Jumlah hasil pembinaan penerima bantuan Jalinan Puspa	60 KPM						
Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinas PMD	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG	60 orang	11.000.000	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinas PMD	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG	60 orang	30.000.000
Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dinas PMD	Jumlah Peserta BBGRM	20 Desa	60.000.000	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dinas PMD	Jumlah Peserta BBGRM	20 Desa	60.000.000
		Kekhusnahan BBGRM tingkat Provinsi	1 Desa				Kekhusnahan BBGRM tingkat Provinsi	1 Desa	
Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMD	Jumlah desa yang aktif dalam melaksanakan gerakan PKK	307 desa/kel	2.000.984.900	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMD	Jumlah desa yang aktif dalam melaksanakan gerakan PKK	307 desa/kel	2.000.000.000
		Jumlah desa yang dibina Tim Penggerak PKK Kabupaten	21 Kec. 42 desa/kel				Jumlah desa yang dibina Tim Penggerak PKK Kabupaten	21 Kec. 42 desa/kel	
		Jumlah desa/kel yang membentuk Keluarga Siaga	307 desa/kel				Jumlah desa/kel yang membentuk Keluarga Siaga	307 desa/kel	

		Jumlah desa/kel yang mengikuti kegiatan pasar krempyang	307 desa/kel				Jumlah desa/kel yang mengikuti kegiatan pasar krempyang	307 desa/kel	
		Jumlah desa/kel yang mengikuti Lomba pasar Ramadhan Tingkat Kab.	307 desa/kel				Jumlah desa/kel yang mengikuti Lomba pasar Ramadhan Tingkat Kab.	21 desa/kel	
		Jumlah peserta pemantauan Anggota (Tim Building)	40 Orang				Jumlah peserta pemantauan Anggota (Tim Building)	40 Orang	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang telah diusulkan ke Propinsi Jawa Timur yang selaras dengan RKPD Propinsi Jawa Timur tahun 2025 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo seperti terlihat pada Tabel T-C. 32 di bawah ini. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun desa, dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal, dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Desa. Dari hasil penelaahan didapatkan kegiatan yang mendukung tujuan diatas seperti pada *Format D* di bawah ini.

Format D

Usulan Program dan Kegiatan
dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Ponorogo

NO	Usulan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Besaran / Volume	Nilai (Rp)
1	Peningkatan kapasitas pengelola Kawasan perdesaan	Kecamatan Puduk dan Kec Siman Kabupaten Ponorogo	Meningkatnya kapasitas pengelola kawasan perdesaan	2 Kawasan	2.000.000.000
2	Peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama	Pengurus BUM Desa dan BUM Desa Bersama Kec. Puduk Kab. Ponorogo	Meningkatnya kapasitas pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama	1 Paket	1.000.000.000
3	Fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga	Pengurus BUM Desa dan BUM Desa Bersama Kec. Puduk Kab. Ponorogo	Pengembangan kerjasama desa BUM Desa	1 Paket	1.000.000.000

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembangunan harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perkembangan jaman, melalui tahapan yang terdiri dari RPJP 25 tahunan, RPJM 5 tahunan dan RKPD 1 Tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026 merupakan implementasi dari visi, misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang mengacu kepada RPJMD Propinsi Jatim 2019 - 2025 dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Ponorogo.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo dan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun berkenaan, sehingga Arah Kebijakan rencana pembangunan jangka menengah di tahun berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan. Sedangkan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Pengendalian atau evaluasi juga diamanatkan dalam Permendagri No.54 Tahun 2010 terhadap dokumen perencanaan yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan terhadap keselarasan antar dokumen dan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan. Evaluasi

keselarasan antar dokumen dapat dilihat dan konsistensi penuangan program kegiatan dalam pencapaian indikator. Pengukuran pencapaian sasaran diukur melalui indikator kinerja.

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2025 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan RKPD Propinsi Jawa Timur tahun 2025, Fokus utama yang harus dilakukan saat ini adalah tentang kebijakan yang harus diambil untuk pemulihan ekonomi pasca covid-19 sehingga kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dapat dipenuhi. Senada dengan *Visi Kabupaten Ponorogo untuk "Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)"*, maka sesuai tema pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2025 adalah Penguatan Kapasitas penciptaan nilai tambah produk pertanian sebagai pendukung industry pengolahan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan yang didukung pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo merencanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang rumusannya menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan secara spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu yang secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

"Mewujudkan Pembangunan Desa yang berkelanjutan"

Adapun sasaran-sasaran yang dimaksud adalah :

"Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa"

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

1. *Prosentase desa Mandiri,*
2. *Prosentase Desa Maju,*
3. *Prosentase Desa Berkembang,*
4. *Indeks Desa Membangun (IDM),*
5. *Prosentase Alokasi Dana Desa (ADD).*

yaitu perbandingan antara jumlah desa berkembang dengan jumlah desa keseluruhan di Kabupaten Ponorogo, perbandingan antara jumlah desa maju

dengan jumlah desa keseluruhan di Kabupaten Ponorogo dan perbandingan antara jumlah desa mandiri dengan jumlah desa keseluruhan di Kabupaten Ponorogo.

Disamping itu untuk nilai Indeks Desa Membangun (IDM) didapatkan dari survey/penilaian dari status kemajuan desa yang dilaksanakan oleh Kemendes Daerah Tertinggal setiap tahun. Untuk Prosentase Alokasi Dana Desa adalah seberapa besar prosentase Alokasi Dana Desa yang dianggarkan tiap tahun terhadap Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kebijakan – kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diterjemahkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo, harus selaras dengan isu - isu strategis dan tema pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 adalah sebagaimana *Format E* dibawah ini:

FormisatE

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Ponorogo

KODE	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana	Catatan penting	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkat Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Penataan Desa					14.579.473.550		15.164.000.000
2.13.03		Prosentase Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah yg ditukrup Prosentase desa baru hasil Pemekaran Desa		95% 100%		4.514.473.550 142.000.000	APBD II	5.000.000.000 204.000.000
2.13.03.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Prosentase desa baru hasil Pemekaran Desa		100%		142.000.000		204.000.000
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi, Perwujudan, Pengembangan, dan Perubahan Stasiun Desa	Jumlah Desa Baru hasil Pemekaran Desa	Dinas PMD	5 Desa		140.000.000	APBD II	200.000.000
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa Baru yang mendapatkan Kode Registrasi Desa dan Gubernur	Dinas PMD	5 Desa		2.000.000		6.000.000
2.13.03	PROGRAM Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Kerjasama Desa yang dilaksanakan		100%		15.000.000		20.000.000

2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Prosentase Kerjasama Desa yang dilaksanakan	Dinas PMD	100%	15.000.000	APBD II	2 Timbul	20.550.000
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD	5 Dokumen	5.000.000	APBD II	2 Team	5.000.000
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Peningkatan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Kawasan Perdesaan	Dinas PMD	2 Kawasan	10.000.000	APBD II	2 Lembaga	15.000.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Administrasi Pemerintahan Desa yang berjalan baik		90%	5.448.000.000		90%	5.448.000.000
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase keputuhan desa terwujud pelaporan/kelempakan administrasi	Dinas PMD	90%	5.448.000.000	APBD II	90%	5.448.000.000
		Prosentase aparatur pemerintahan desa yang tidak tersangkut hukum		85%			85%	

2.13.04.2.01.09	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.	Jumlah Bumdesa yang mengikuti pembinaan tingkat Kabupaten.	Dinas PMD	20 Bumdesa	320.000.000	APBD II		20 Bumdesa	320.000.000
		Jumlah BUMDesa yang dibangun.		281 Bumdesa				281 Bumdesa	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.	Jumlah lomba Bumdes tingkat Propinsi.		1 Bumdesa				Hadiah Lomba	
		Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa KDAW	Dinas PMD	5 desa				0	375.000.000
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.	Jumlah Kepala Desa terpilih melalui proses Pilkadaes serentak		-		APBD II			
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengisian lowongan Perangkat Desa	Dinas PMD	218 desa	4.000.000.000	APBD III		63 desa	4.000.000.000

		Jumlah desa yang difasilitasi jaminan Kesehatan.		281 Desa				281 Desa	
		Jumlah desa yang difasilitasi pengisian anggota BPD antar waktu.		281 Desa				281 Desa	
2.13.04.2.01.11	Facilitasi Penyusunan Profil Desa.	Jumlah desa yang menerapkan Aplikasi SID/Sistem Informasi Desa ONLINE.	Dinas PMD	281 Desa/ 26 Kelurahan	200.000.000	APBD II	E.M. Server Backup	281 Desa	200.000.000
		Jumlah Dokumen Profil Desa dan Kelurahan yang dihasilkan.		307 Dokumen				307 Dokumen	
2.13.04.2.01.12	Facilitasi Peretapan dan Pengisian Batai Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan pengisian Batai Desa		281 Desa	100.000.000			281 Desa	100.000.000
2.13.04.2.01.13	Facilitasi Pengelolaan Asot Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan aset desa.	Dinas PMD	281 desa	70.000.000	APBD II		281 desa	70.000.000

2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah pembinaan untuk meningkatkan kapasitas Perangkat Desa, BPD, Kelembagaan Desa.	Dinas PMD	0	100.000.000	APBD II	Biaya Pegawai dan Pelatihan anggota BPD	302 Orang	100.000.000
2.13.04.2.01.19	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.	Jumlah desa yang difasilitasi untuk mengikuti evaluasi perkembangan desa.	Dinas PMD	20 desa	60.000.000	APBD II		20 desa	60.000.000
		Jumlah pelaksanaan Lomba desa tingkat Propinsi		1 Desa				281 Desa	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DARI MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina		80%	4.450.000.000	APBD II		80%	4.450.000.000
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Dinas PMD	80%	4.450.000.000	APBD II		7%	4.450.000.000
		Prosentase desa dengan kader PKK aktif		100%				7%	
		Prosentase desa yang mengikuti BAGRMA		7%				90%	

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Tim Pokjanel yang aktif mengikuti rakor.	100 orang	100 orang				100 orang	
	Jumlah Perbub yang mendukung pelaksanaan penurunan stunting	1 Perbub	1 Perbub				1 Perbub	
	Jumlah Kader Pembangunan Manusia (KPM) bidang Staunting	21 KPM (mewakil 21 Kec)	21 KPM (mewakil 21 Kec)				21 KPM (mewakil 21 Kec)	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti musyawarah kelembagaan desa dan kelurahan	281 desa dan 26 kelurahan	281 desa dan 26 kelurahan				281 desa dan 26 kelurahan	
	Jumlah Desa yang mempunyai Lembaga Adat Desa	5 Desa	5 Desa				5 Desa	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa	20 Desa	20 Desa				20 Desa	

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan ekseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Pendapatan Desa secara signifikan sebagai implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Penerapan pengelolaan keuangan yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa.
3. Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pengelola Keuangan dan Asset Desa.
4. Kurang optimalnya peran dan fungsi Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
5. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
6. Kurang optimalnya Pengembangan dan Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna (TTG) dalam peningkatan Usaha Ekonomi Perdesaan.
7. Belum optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR		VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp)
		OUTPUT	OUTCOME		
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				4.314.473.850
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase dokumen Laporan Perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja OPD.	Meningkatnya penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.	100%	2.500.000
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan : - Renja - RKA/DPA - Renstra	Meningkatnya Penyusunan Program dan Pelaporan di lingkup Dinas.	2 Dok 3 Dok 1 Dok	2.500.000
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja - Sakip - LPPD		1 Dok 1 Dok	0
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase dokumen pengelolaan keuangan dengan tepat dan benar.	Meningkatnya penyusunan administrasi keuangan Dinas.	95%	3.618.471.000
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan yang dibayarkan.	Tercukupinya gaji dan tunjangan karyawan/ karyawan/ dinas	14 kali	3.539.871.000
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Jumlah Jasa Administrasi keuangan yang disediakan	Tersedianya Jasa administrasi Keuangan.	6 Orang	77.100.000
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD.	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan. Jumlah Dokumen SPP yang diteliti.	Tercukupinya Laporan Keuangan di lingkungan Dinas PMD.	14 Dokumen 250 Dokumen	0
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi	Meningkatnya kapasitas ASN di Lingkungan Dinas	100%	200.000.000

		perkantoran sesuai dengan SOP	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah karyawan / karyawan yang mengikuti Bimbingan Teknis.	Terlaksananya Bimbingan Teknis.	31 Orang	200.000.000
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP	Meningkatnya penyediaan Administrasi Umum.	90%	200.733.000
1.3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah karyawan/karyawan yang mendapatkan makanan dan minuman harian.	Tercukupinya bahan logistik kantor.	7520 porsi	140.444.000
1.3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan.	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan.	5 item	9.289.000
1.3.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan surat kabar yang disediakan.	Tercukupinya bahan bacaan.	30 exempl	1.000.000
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah karyawan/karyawan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.	Tercukupinya transportasi dan akomodasi perjalanan dinas.	95 kali	50.000.000
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Prosentase sarana prasarana operatur yang layak fungsi.	Terperuhnyasara na prasarana operatur yang layak fungsi.	95%	1.411.000
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Gedung kantor yang dibeli.	Tercukupinya peralatan Gedung Kantor.	5 item	1.411.000
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Prosentasi Administrasi Umum sesuai SOP.	Meningkatnya Administrasi Umum sesuai SOP.	95%	285.845.850
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK).	Tercukupinya Alat Tulis Kantor (ATK).	42 item	52.758.850
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah pembayaran tagihan rekening telepon dan internet.	Tercukupinya pembayaran tagihan rekening telepon dan internet kantor.	36 kali	46.230.500
1.5.3	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor.	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki.	Terpeliharanya peralatan kerja kantor.	6 item	30.180.000
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan.	Tercukupinya kebersihan kantor.	28 kali	156.676.500
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Prosentase terpeliharanya barang milik	Terperuhinya pemeliharaan barang milik	95%	205.512.800

	Usuran Pemerintahan Daerah.	daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah.		
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara.	Terakupnya pemeliharaan kendaraan dinas.	3 Unit	205.512.800
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase desa baru hasil Pemekaran Desa	Terbentuknya desa definitive hasil Pemekaran		142.000.000
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase desa baru hasil Pemekaran Desa	Terfasilitasinya Proses Pemekaran Desa	100%	142.000.000
	Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah desa baru hasil Pemekaran Desa	Terbentuknya desa baru hasil Pemekaran desa	5 Desa	140.000.000
	Facilitasi Penataan dan Kode Desa	Jumlah Desa Baru yang mendapatkan Kode Registrasi Desa dari Gubernur	Terregistrasinya Desa Baru hasil Pemekaran Desa	5 Desa	2.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Presentase Kerjasama Desa yang dilaksanakan	Terjalannya kerjasama antar desa di Kab. Ponorogo		15.000.000
2.1	Facilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah kawasan perdesaan yang di fasilitasi pembangunan ekonomi, sarana dan prasarana kawasan perdesaan	Meningkatnya pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Kawasan	15.000.000
2.1.1	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP Kawasan) yang mendapatkan pembinaan manajemen pengembangan kawasan perdesaan	Terbentuknya kolembagaan yang memfasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	5.000.000
2.1.2	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya pembangunan ekonomi dan sarana/prasarana Kawasan Perdesaan	2 Lembaga	10.000.000
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Administrasi Pemerintahan Desa yang berjalan baik	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	90%	5.448.300.000

3.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.	Prosentase kepatuhan desa terhadap pelaporan/kelempangan administrasi.	Meningkatnya penyusunan dan pelaksanaan tata pemerintahan desa, keuangan, dan aset desa serta pengembangan aparatur desa.	80%	3.448.000.000
		Prosentase aparat pemerintahan desa yang tidak melanggar hukum.		85%	
		Prosentase penyusunan produk hukum mengenai desa yang tercapai.		85%	
3.1.1	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum mengenai desa yang terbentuk.	Terbentuknya / terwujudnya produk hukum desa mengenai Desa	10 Perbub	50.000.000
3.1.2	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) nya.	Meningkatnya tertib perencanaan, pelaksanaan, peratuasahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.	281 desa	50.000.000
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa		281 desa	
3.1.3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Desa.	562 orang	100.000.000
		Jumlah peserta pembinaan Hukum bagi Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya pengetahuan tentang hukum bagi Aparatur Pemerintah Desa.	281 orang	
3.1.4	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah produk Hukum Desa yang dievaluasi dan diklasifikasi.	Tersedianya produk hukum desa yang benar.	115 Produk Hukum	3.000.000
3.1.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.	Jumlah Bumdesa yang mengikuti pembinaan tingkat Kabupaten	Meningkatnya kualitas pengelola BUMDesa.	20 Bumdes a	320.000.000
		Jumlah BUMDesa yang dibina.		281 Bumdes a	
		Jumlah jomba Bumdes tingkat Propinsi.		1 Bumdes a	
		Jumlah peserta entry DDC.		281 Desa	

		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan		1 dokumen	
3.1.6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa KDAW	Tersinya Jabatan Kepala Desa hasil KDAW	5 Desa	375.000.000
3.1.7	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengisian Lowongan Perangkat Desa	Tersinya Perangkat Desa sesuai dengan SOTK Desa	218 desa	4.000.000.000
		Jumlah desa yang difasilitasi Jaminan Kesehatan		281 Desa	
		Jumlah desa yang difasilitasi pengisian anggota BPD antar waktu	Tersinya Anggota BPD Pengganti Antar Waktu	281 Desa	
3.1.8	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa/Kel yang menerapkan Aplikasi SID/Sistem Informasi Desa ONLINE	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)	281 Desa	200.000.000
		Jumlah Dokumen Profil Desa dan Kelurahan yang dihasilkan	Tersedianya profil Desa/kelurahan yang bisa diakses	307 Dokumen	
3.1.9	Fasilitasi Penetapan dan Penegakan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegakan Batas Desa	Tersedianya dokumen Batas Desa	281 Desa	100.000.000
3.1.10	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan aset desa	Meningkatnya Administrasi Pengelolaan Aset Desa yang transparan dan akuntabel	281 desa	70.000.000
3.1.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Desa yang Anggota BPD nya mengikuti Pelatihan BPD	Meningkatnya kapasitas Ketua BPD	281 Desa	100.000.000
3.1.12	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi untuk mengikuti evaluasi perkembangan desa	Meningkatnya pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat desa	20 desa	80.000.000
		Jumlah kekutsertaan Lomba desa tingkat Provinsi		1 Desa	
		Jumlah Desa yang mengentry di EDESSEL	Tersinya Data Desa di EDESSEL	281 Desa	
		Jumlah Laporan Kegiatan		1 Dokumen	

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	80%	4.460.000.000
4.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Prosentase sosialisasi Kelembagaan yang diselenggarakan	Meningkatnya koordinasi dan pelaksanaan penguatan kelembagaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan sosial budaya serta masyarakat hukum adat.	90%	4.460.000.000
Prosentase terbentuknya Forum BUMDesa Kecamatan		90%			
Prosentase terbentuknya Forum BUMDesa Kabupaten		100%			
Prosentase BUMDesa terdaftar di E-Katalog Lokal LPSE		28%			
Prosentase desa dengan kader PKK aktif		100%			
Prosentase keikutsertaan puncak perayaan BBGRM tk Propinsi.		100%			
Prosentase pasar desa yang tertib administrasi.		90%			
Prosentase Pembinaan kepada masyarakat kurang mampu		95%			
Prosentase pengurus Dharma Wanita aktif.		95%			
Prosentase Tim Pokjani Poyandu (KPM) aktif.		90%			
	Prosentase pembinaan, pelaksanaan & pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keberdayaan Masyarakat Desa		75%		
	Prosentase pembinaan pelaksanaan pengembangan Teknologi Tepat		75%		

		Guna (TTG) dan Pemanfaatan TTG			
4.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah pengurus & anggota Dharma Wanita yang aktif.	Meningkatkan peran & fungsi pengurus anggota Dharma Wanita	200 orang	80.000.000
		Jumlah Tim Pokjanal Posyandu (KPM) aktif	Meningkatnya pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat desa	281 desa	
		Jumlah Sosialisasi Peningkatan Kelembagaan yang dilaksanakan		40 titik	
		Jumlah Dokumen persiapan kegiatan	Tersedianya data untuk pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Kelembagaan	40 Dokumen	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan		1 dokumen	
4.1.2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Kelompok Masyarakat (Pokmas) penerima bantuan hibah	Tertersedianya bantuan hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas)	208 Pokmas	2.200.000.000
4.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Jumlah Pasar Desa yang mengikuti Pembinaan.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pasar Desa	40 Pasar Desa	70.000.000
		Jumlah peserta Pelatihan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemanfaatan TTG	30 orang	
		Jumlah hasil pembinaan peserta pelatihan SDA	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan keberdayaan masyarakat desa.	20 orang	
		Jumlah hasil pembinaan Pengelolaan Sumber Mata Air	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan keberdayaan masyarakat desa.	8 kelompok	

		Jumlah hasil pembinaan penerima bantuan Jatim Puspa	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat kurang mampu	60 KPM	
4.1.4	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG	Terlaksananya Pelatihan TTG	60 orang/K elp	30.000.000
4.1.5	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kekutaertaan Puncak perayaan BBGRM tingkat Propinsi	Meningkatnya pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat desa	1 kali	80.000.000
4.1.6	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa yang aktif dalam melaksanakan gerakan PKK	Meningkatnya Kader PKK aktif	307 desa/kel	2.000.000.000
		Jumlah desa yang dibina Tim Penggerak PKK Kabupaten		21 Kec, 42 desa/kel	
		Jumlah desa/kel yang membentuk Keluarga Siaga		307 desa/kel	
		Jumlah desa/kel yang mengikuti kegiatan pasar krempyeng		307 desa/kel	
		Jumlah desa/kel yang mengikuti Lomba pasar Ramadhan Tingkat Kab.		307 desa/kel	
		Jumlah peserta pemantapan Anggota (Tim Building)		40 Orang	
JUMLAH TOTAL					14.579.473.650

BAB V PENUTUP

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo tahun 2025 merupakan reviu dokumen perencanaan pembangunan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan program – program prioritas yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga tercapai konsistensi dan sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan dengan program – program pembangunan.

Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, monitoring dan evaluasi harus selalu diterapkan. Penerapan prinsip-prinsip ini akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat, sehingga masyarakat juga ikut merasa memiliki dalam mewujudkan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintahan desa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
Kabupaten Ponorogo



Tony Sumarsono, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710117 199101 1 002